



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 September 2020/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SUB UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M MANSYUR**
2. Jabatan : **CALON WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **759768**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 378.622.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/160 m2 di KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 142.342.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/100 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 80.400.000
3. Tanah Seluas 325 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 710 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.880.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 482.209.953**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.070.831.953**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.070.831.953

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.